



**Siapkan Proses Hukum**

# Hotel Penggelap Pajak Dibidik KPK

**YOGYA (KR)** - Sejumlah hotel di Yogyakarta terindikasi menunggak pembayaran pajak. Padahal hotel tersebut telah memungut pajak dari tamu yang menginap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian serius terhadap hotel-

hotel yang tidak menyetorkan hasil pungutan pajaknya ke negara. Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah VIII KPK RI Adlinsyah Malik Nasution, dalam sosialisasi dengan wajib pungut pajak di Balaikota, Rabu (7/8). Di

daerah, wajib pungut pajak meliputi pengusaha hotel, restoran, hiburan dan parkir. "Bayarkan sesuai yang dipungut. Kalau tidak sesuai atau kurang, maka itu bisa menjadi penggelapan. Hati-hati itu," ujarnya mengingatkan.

Khusus untuk wajib pungut pajak sektor hotel, kini juga tengah menjadi bidikan KPK. Hal ini lantaran ada sejumlah hotel di Kota Yogya yang tercatat menunggak pembayaran pajak. Padahal, pajak tersebut sudah dibayarkan oleh wajib

Adlinsyah bahkan secara tegas menyebutkan inisial hotel tersebut. Di antaranya Hotel M, Hotel G, Hotel H di Malioboro serta Hotel T, Hotel N dan Hotel L.

\* Bersambung hal 7 kol 5

**Hotel** .....

Setiap tamu yang menginap, maka pajak sebesar 10 persen sudah dibayarkan sekaligus ke wajib pungut pajak. "Saya tidak bisa menerima alasan kalau pajak itu digunakan oleh wajib pungut pajak. Jangan disentuh karena itu milik pemerintah. Kalau ada yang tidak menyetorkan, walikota harus garang. Di tempat lain, yang seperti itu sudah diportal oleh Satpol PP" tandasnya.

Sejauh ini, kata Adlinsyah, supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogya tengah digencarkan. KPK bahkan meminta Walikota Yogya agar lebih 'sangat' atau garang dalam menghadapi wajib pungut pajak yang tidak segera membayarkan pajak yang sudah dipungut dari wajib pajak.

Oleh karena itu, jika ada piutang atau tunggakan pajak yang tidak dibayarkan, KPK akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat sebagai juri tagihnya. Bahkan, ketika bukti sudah cukup maka bisa secepatnya diproses hukum karena ada ancaman pidana. Apalagi pajak sektor hotel tidak sekadar sewa kamar, melainkan juga kafe, ruang pertemuan, laundry, restoran, parkir serta spa.

"Saya juga pesan, wajib pungut pajak jangan ada yang menghambat pemasangan alat tapping box," tandasnya.

Sementara Kapolresta Yogya Kombes Pol Amaini, juga tercengang banyaknya tunggakan dari wajib pungut pajak sektor hotel. Selama satu tahun empat bulan berkarier di Kota Yogya, dirinya mengaku sudah seratus kali lebih memesan kamar hotel untuk tamunya. Dirinya pun sudah membayarkan sewa kamar berikut pajaknya ke pengelola hotel.

"Kami bersama kejaksaan siap bergerak jika ada yang tidak membayarkan. Fungsi kami di sini juga untuk membantu pemda," katanya.

Sementara Walikota Yogya Hartono Suyuti, menilai pemasangan alat berupa tapping box merupakan upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pajak. Melalui program tersebut, selain untuk memonitor pajak juga bisa dimonitor oleh publik. Sehingga potensi kebocoran pajak bisa dicegah.

(Dh)-d

**Sambungan hal 1**

.....

Instansi

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005